

## MENELUSURI WACANA KEMANDIRIAN EKONOMI DI INDONESIA (1920-1965)

**Rhoma Dwi Aria Yuliantri**

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Email: [rhoma@uny.ac.id](mailto:rhoma@uny.ac.id)

Diterima: 27 Mei 2021, Disetujui: 27 Mei 2021, Dipublikasikan: 31 Mei 2021

**Abstract.** *Economic independence is defined as an economic strategy that prioritizes the national economy by the nation itself above foreign interests. In essence, the concept of economic independence is part of political ideas that have been developed by Indonesian thinkers and implemented in their respective contexts. Using the historical method, this research focuses on the idea of political economy independence initiated by Sukarno, and how this idea was implemented and translated by people in the future. His concept of political and economic independence is still being implemented and applied. Eventhough wrapped in different ways, but the essence remains the same. It was often juxtaposed with the Swadesi idea by Mahatma Gandhi from India. Both ideas appeared similar but were not essentially the same. Sukarno's idea of political economic independence emphasized "egalitarianism", which was not based on certain social classes and groups. Gandhi's Swadesi ideas did not emphasize elements of egalitarianism because of the influence of the cultural context of Indian society, which closely related to social strata.*

**Keywords:** *History of thought, economic independence, Sukarno, Indonesia, twentieth century*

**Abstrak.** Kemandirian ekonomi diartikan sebagai strategi ekonomi yang mementingkan ekonomi nasional oleh bangsa sendiri di atas kepentingan asing. Hakikatnya konsep kemandirian ekonomi menjadi bagian gagasan politik yang telah dikembangkan oleh para pemikir Indonesia dan diimplementasikan pada konteksnya masing-masing. Dengan metode Sejarah, penelitian ini berfokus pada gagasan kemandirian ekonomi politik yang digagas oleh Sukarno dan bagaimana gagasan tersebut diimplemantasikan dan diterjemahkan oleh orang-orang pada masa sesudahnya. Konsep kemandirian ekonomi politik Sukarno hingga saat ini masih diimpletasikan dan diterapkan meskipun seringkali dibungkus dengan cara berbeda tetapi dalam esensi yang sama. Konsep Sukarno tersebut kerap disandingkan dengan gagasan Swadesi oleh Mahatma Gandhi dari India. Kedua gagasan tersebut nampak serupa tetapi pada hakekatnya tidak sama. Gagasan kemandirian ekonomi politik Sukarno menekankan pada "egaliterianisme" yang tidak melandaskan pada kelas dan kelompok sosial tertentu. Gagasan Swadesi Gandhi tidak menekankan elemen egalitarianisme karena pengaruh dari konteks kultural masyarakat India, yang lekat dengan strata sosial.

**Kata Kunci:** *Sejarah pemikiran, kemandirian ekonomi, Sukarno, Indonesia, abad kedua puluh*

## PENDAHULUAN

*Economic self sufficiency* (kemandirian/swasembada ekonomi) adalah sebuah paradigma politik ekonomi yang saat ini menjadi bagian yang saat ini dipercaya oleh kelompok tertentu sebagai upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemandirian ekonomi menjadi salah satu upaya untuk mencapai kecukupan kebutuhan hidup paling mendasar masyarakat baik yang banyak ditekankan dalam pangan, sadang, sarana kesehatan dan lainnya.

Saat ini konsep kemandirian ekonomi diterapkan sebagai suatu alternatif akan harapan mencapai masyarakat dalam skala mikro menjadi "sejahtera" di tengah pasar global dan liberalisasi. Dalam konteks Indonesia kontemporer contoh dari implementasi kemandirian ekonomi dilakukan oleh Founder Agro Learning Center (ALC) I Nyoman Baskara. ALC mengharapkan gerakan swadhesi mewujudkan kedaulatan pangan dalam upaya mengatasi. Spirit gerakan tersebut dalam kaitannya dengan memaksimalkan potensi pangan daerah dan dalam negeri untuk memutus ketergantungan pada negara lain. "Segala kebutuhan hidup, semaksimal mungkin dipenuhi dari produksi sendiri. Bangga memakai produksi dalam negeri adalah keniscayaan," ujarnya. Menurutnya, konsep/filosofi Swadhesi harus ditanamkan pada jiwa anak-anak bangsa, sejak dini (Artaya, 2020). Penerapan kemandirian yang berkembang saat ini juga mulai mengarah pada konsep untuk mengatasi pasar akibat liberalisme dan krisis ekonomi tetapi juga mengatasi persoalan krisis lingkungan sebagaimana dilakukan oleh ALC. Contoh ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi adalah konsep yang dinamis dan terus berkembang.

Artikel ini memfokuskan kepada munculnya gagasan kemandirian ekonomi dalam bagian kerangka politik. Artikel ini

tidak akan melihat aktifitas ekonomi secara praktis. Kerelativan pemaknaan secara gagasan tentang kemandirian ekonomi dilihat dalam periode yang panjang dengan mengambil beberapa pemaknaan gagasan serupa dari periode ke periode, dari masa kolonial sampai Indonesia merdeka (1920-1965). Periode yang panjang menjadi landasan dalam pembahasan untuk melihat kesinambungan dan pola-pola perubahan dalam gagasan itu termasuk jejaring gagasan yang telah hadir.

Perkembangan konsep itu bisa ditelusuri dalam konteks awal abad ke dua puluh ketika mulai berkembang dan menjadi kesadaran sebagai negara terjajah. Saat itu, gagasan tersebut menjadi bagian tren politik yang mendorong para nasionalis mengagaskan kemandirian ekonomi bersamaan dengan dengan kuatnya angin anti imperialisme dan kapitalisme di wilayah Asia pada awal abad ke dua puluh. Para nasionalis yang mencita-citakan kemandirian politik melihat hubungan logis antara persatuan politik dan ekonomi, klausul perdagangan antarnegara bagian adalah pengakuan bijak mereka atas prinsip bahwa negara-bangsa harus hidup dengan kemandirian. Dalam konteks inilah para nasionalis seperti Sukarno menyerukan gagasan politik dalam bidang ekonomi untuk perlindungan terhadap kepentingan asing yang merebut pasar-pasar baru, kemajuan imperialisme ekonomi.

Kebertautan dan jejaring konsep kemandirian ekonomi dapat dilihat dari maraknya konsep itudi wilayah Asia di paruh awal abad ke dua puluh sebagai contoh. Gagasan kemandirian ekonomi sering dikaitkan dengan upaya modernisasi yang gagal total, kehadiran ideologi ekstrim yaitu nasionalisme fundamental mendorong jalan nasional yang mandiri dan tren politik muncul. Di negara-negara Asia seperti India dan Indonesia kemandirian ekonomi semakin berkembang seiring munculnya nasionalisme dan semangat untuk

membangun kemerdekaan politik. Kemandirian ekonomi menjadi bagian konsep politik di wilayah-wilayah Asia muncul seiring dengan konteks berkembangnya gagasan nasionalisme utamanya dorongan semangat pembebasan dari negara-bangsa terjajah seiring dengan gagasan modernisme lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme (Dharam P. Ghai, 1973: 21-42).

Pada waktu yang berbeda yaitu pada kurun Indonesia merdeka kemandirian ekonomi diterapkan dalam skala yang lebih besar yaitu skala negara. Penerapan dalam skala negara itu adalah bagian dari kebijakan politik negara yang memiliki istilah berbeda tapi esensi makna yang sama. Hal ini sebagaimana diterapkan pada masa Sukarno dengan konsep “berdikari”.

## KAJIAN TEORI

Konsep *economic self sufficiency*/kemandirian ekonomi sering menjadi bagian dari konsep ekonomi politik yang masih diyakini dan diimplemetasikan dari waktu ke waktu dengan definisi yang berbeda. Dalam konteks masa lalu kemandirian ekonomi adalah upaya dalam mengatasi persolaalan krisis ekonomi dalam masyarakat kan tetapi dalam konteks kini adlah upaya alternatif untuk mengatasi krisis lingkungan akibat globalisasi. Saat ini kemandirian ekonomi dianggap sebagai upaya dalam menemukan arah pembangunan masa depan, jalan tengah, terutama sekarang dengan proses mengejar ekonomi dan pembangunan sosial untuk mengimbangi globalisasi. Sebagai janji masa depan, kemandirian ekonomi memastikan keseimbangan dan kesiapan untuk menghadapi perubahan yang cepat dan ekstensif sehubungan dengan material, masyarakat, lingkungan, dan budaya (Priyanut Piboolsravut, 2004: 128).

Kemandirian ekonomi adalah sebuah konsep untuk menggambarkan

kecukupan secara “relative”. Kecukupan relative sekaligus menjelaskan bahwa kemandirian/swasembada ekonomi, baik dalam teori dan praktik, suatu negara-bangsa riil berubah seiring dan karena zaman berubah (Geogrege Otis Smith, 117). Selain itu relatif kecukupan juga menggambarkan proses penawaran dan permintaan antar geografis jarak dan distribusi yang tidak stabil. Satu negara dengan negara lain memiliki ketergantungan secara ekonomi yang eksrekpresikan dalam berbagai bentuk barang- serat, hasil hutan, bahan bakar mineral, bahan baku mentah dan lainnya-memunculkan apa yang sering disebut sebagai bentuk “ketergantungan” sekaligus “kerjasama”.

Dilihat dari bentuk dan fungsi kemandirian ekonomi merujuk pada pada level-level yang universal bisa diterapkan dalam domain yag lebih kecil seperti individu, keluarga, komunitas maupun dalam skala besar yaitu dalam kebijakan ekomi negara degan domainnya warga negara dalam wilayah itu (Priyanut Pibbolsravut, 2004: 128). Dalam kerangka ekonomi global kemandirian ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh Leo Grebler sering dikaitkan sebagai suatu gagasan untuk menentang imperialisme. Meskipun demikian kemandirian ekonomi bukanlah doktrin yang secara total “tertutup” dari dunia internasional dan bukan mengarah pada isolasi internasional (Leo Grebler, 1938: 1)

Jejak implementasi kemandirian ekonomi bisa dilihat di Rusia pada abad ke sembilan belas sebagaimana dituliskan oleh John Maynard Keynes. John Maynard melihat Rusia dengan eksperimen kemandirian ekonomi dalam skala kebijakan politik nasional menghasilkan sebuah kegagalan. Konsep kemandirian ekonomi seringkali menjadi bagian dari konsep ekonomi politik yang masih diyakini dan diimplemetasikan dari waktu ke waktu. Harapan untuk mencapai masyarakat dalam skala mikro menjadi

“sejahtera” justru mengalami hal sebaliknya yaitu merusak dan desolati. Proses pertanian memiliki akar yang dalam di Rusia, tetapi petani bekerja sendiri-sendiri, lambat, menolak perubahan dan rapuh (Leo Grebler, 1938: 1).

Penelitian Ivan T Berend juga memberikan gambaran penting tentang kemandirian ekonominya setelah kegagalan Perang Dunia I. Menurut T Berend kegagalan Perang menjadi pendorong negara-negara (kebanyakan baru merdeka) di wilayah tersebut beralih ke nasionalisme ekonomi. Proteksionisme dan intervensi negara membantu substitusi impor. Hal terpenting dari analisis T Berend bahwa swasembada tidak berhasil dengan minimnya teknologi modern dan sektor unggulan modern membuat negara-negara kecil Eropa Tengah dan Timur.

Gagasan kemandirian ekonomi dalam kajian ini cenderung pada ekonomi yang dimaksud menekan pada penerapan metode ekonomi terhadap politik, pilihan publik. Ini berarti menekankan bahwa ide ilmu yang menelaah wilayah ekonomi dan politik, bukan sebagai telaah pada peristiwa ekonomi yang terjadi melainkan penalaran ekonomi terhadap proses-proses politik (James A. Caporasa, 305). Meskipun berfokus pada gagasan kemandirian ekonomi di Indonesia dengan koneksitasnya akan tetapi juga dilihat dalam upaya penerapan dalam skala negara meskipun tidak detail pada peristiwa ekonomi sebagaimana dilakukan oleh Ivan T Berend.

## **METODE PENELITIAN**

Objek penelitian ini adalah salah satu bagian permasalahan yang diangkat adalah gagasan kemandirian ekonomi di Indonesia dari periode tumbuh berkembang dan penerapan dalam skala besar (1930-an - 1965-an). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan sumber baik yang

bersifat primer ataupun sekunder. Sumber-sumber itu ditelusuri dari tulisan orang-orang yang memiliki gagasan tentang kemandirian ekonomi, misalnya artikel yang ditulis oleh Sukarno. Penulisan menggunakan pendekatan ekonomi politik untuk menganalisis gagasan tentang kemandirian ekonomi. Strategi analisis yang akan digunakan dalam hal ini adalah analisis wacana tekstual dan non-tekstual. Metode analisis akan menerapkan kerangka Fairclough dengan memfokuskan bagaimana teks diproduksi dengan membandingkan teks dan melihat asal-usul teks (Marianne Jorgensen and Louise J. Phillips, 2002: 149). Langkah terakhir dari studi ini adalah historiografi. Historiografi disusun berdasarkan konstruksi peneliti mengenai gagasan kemandirian ekonomi.

## **PEMBAHASAN**

Bagian ini berfokus pada untuk melihat konteks dan interkoneksi gagasan kemandirian ekonomi yang berkembang di kurun awal abad ke dua puluh. Perkebangan gagasan pada awal abad kedua puluh merupakan awal penting untuk melihat bagaimana gagasan kemandirian ekonomi itu diwacanakan seiring dengan semangat nasionalisme yang pada akhirnya mengerucut pada semangat kemerdekaan politik. Gerakan nasionalisme yang menguat di wilayah-wilayah Asia membentuk konektivitas tersendiri diparuh awal abad kedua puluh. Konektivitas itu hadir dari berbagai saluran dan sarana bersama proses modernisasi.

Pola-pola penerapan kemandirian ekonomi adalah sebuah inisiatif dalam mengatasi krisis dan kolonialisme. Hal ini bisa dilihat hubungan gerakan anti kolonial antara pemikir India dan Nusantara (Indonesia) kian menguat. Gerakan itu muncul dalam berbagai konsep yang membungkus seperti nasionalisme. Tokoh Mahatma Gandhi dan

Rabindranath Tagore (memberikan dukungan pada gerakan kemerdekaan India) merupakan tokoh yang mengilhami semangat nasionalisme dan kemandirian ekonomi dengan gerakan swadesi di Indonesia (*Suara Umum*, 14 Juli 1927).

Gerakan swadesi di tahun-tahun 1920an turut menjadi wacana yang didiskusikan secara terbuka dalam media/surat kabar di Indonesia. Wacana itu diterjemahkan dalam konsep Indonesia dan muncul dalam wacana “identitas kebangsaan” bagian dari wacana Nasionalisme yang lebih lusa. Gerakan ini tentu saja menjadi bagian dari gerakan politik kebangsaan. Sebagai contoh diadakan kongres swadesi pada bulan Januari 1932. Pada kongres itu Sartono, tokoh Partai Nasionalis Indonesia (PNI), menekankan menggunakan identitas simbolik “pakaian” yang khas nusantara. Seperti berani berpakaian lurik (lurik adalah pakaian orang-orang kelas bawah). Selain Gandhi, Sartono juga mencontohkan tokoh Italia Benito Mussolini yang mengenakan pakaian produk-produk dari Italia (*Suara Umum*, 2 Januari 1932). Sartono juga merujuk Jepang sebagai negara yang patut dicontoh dalam swadesi untuk memproduksi barang-barang sendiri (*Suara Umum*, 26 Maret 1932). Gagasan swadesi di era itu juga mengerucut pada gagasan ekonomi yang lebih mandiri dengan membangun industri sendiri oleh pribumi.

Apakah prinsip “gerakan swadesi”, kemandirian ekonomi termasuk di dalamnya, milik Gandhi diterima begitu saja oleh kaum nasionalis di Indonesia? Sartono, secara terbuka melakukan gerakan swadesi sementara tokoh PNI lainnya Sukarno tidak menentang gagasan ekonomi dalam swadesi tetapi mengkritikinya dan memiliki cara pandang yang berbeda.

Gagasan kemandirian ekonomi oleh Sukarno bisa ditelusuri dari artikelnya berjudul “Swadeshi dan massa-Aksi di Indonesia: Dan Swadeshi dan

Imperialisme”. Berdasarkan konteks situasi dan sifat imperialisme yang berbeda antara Indonesia dan India maka dalam perpektif Sukarno swadesi tidak bisa diimplementasikan di Indonesia. Dalam konteks India, swadesi merupakan program imperialis Inggris:

“tidak! Semboyan “dengan swadeshi mendatangkan kemerdekaan” yang buat India ada begitu besar *shakti*-nya, semboyan itu buat Indonesia *tidaklah* bisa dipakai. ...Kemerdekaan Indonesia tidak bisa didatangkan dengan pergerakan swadeshi, kemerdekaan Indonesia hanyalah bisa ditangan dengan politieke massaactie yang berasas marhaenisme. ...apa faedahnya swadeshi itu—faedahnya bagi pelajar meninggikan productiviteit masyarakat Indonesia, dengan syarat-syaratnya agar supaya swadesi itu tidak menjadi pergerakan yang sosial-reasioner, dan agar supaya pergerakan swadeshi itu tidak menjadi alat bagi kaum munafik candidaatbourgeois untuk menggemukkan kantongnya sendiri. Tetapi karangan saya ini bisa saya tutup dengan tidak satu kali lagi memperingatkan: Leyapkanlah segala pengiraan bahwa swadeshi bisa mendatangkan Indonesia merdeka (Sukarno, *Suluh Indonesia Muda*, 1932).

Sukarno tidak menolak sistem swadesi yang ditawarkan Gandhi dan yang diyakini oleh para nasionalis seperti Sartono. Tetapi Sukarno tidak menerima gagasan swadesi untuk diterapkan di Indonesia. Mengapa filosofi kemandirian ekonomi dalam swadesi tidak bisa diterapkan sebagai upaya jalan menuju kemerdekaan Indonesia? Dengan tegas

Sukarno berpendapat bahwa, bentuk imperialis India dan Belanda memiliki perbedaan karakteristik asal. Menurut Sukarno India dan Indonesia sama-sama negara terjajah tetapi imperialisme yang dilakukan oleh Inggris maupun India memiliki perbedaan. Perbedaan itu terletak pada karakteristik kedua negara, Inggris dalam kaca mata Sukarno adalah negara bermata dua dalam melakukan praktek kolonialisme dengan menerapkan imperialisme yang dilandaskan *mechanische* dan *industrieele revolutie* (Sukarno, *Suluh Indonesia Muda*, 1932: 155).

Artinya bahwa industrilah yang menyokong pergerakan kaum nasionalis di India. Sementara, menurut Sukarno, kolonialisme di Indonesia oleh Belanda adalah bentuk imperialisme kuno. Hal ini dikarenakan Belanda tidak pernah mengalami *mechanische* dan *industrieele revolutie*. Maka bentuk yang imperialisme yang diterapkan Belanda di Indonesia adalah semi-liberal yang tidak pernah memberikan kesempatan rakyat Indonesia sama sekali (Sukarno, *Suluh Indonesia Muda*, 1932: 155). Sukarno sendiri menyebutkan bahwa liberalisme dalam bidang ekonomi memang pernah diterapkan oleh Belanda di Indonesia. Memang, tahun 1870-1900 Belanda di Indonesia membuka peluang untuk kaum penguasa Belanda dan modal swasta dari berbagai usaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut M.C. Ricklefs penanaman modal asing ini telah membuka peluang bagi modal Perancis-Belgia, Jepang, Jerman, Swiss dan lainnya untuk. Meski demikian menurut Sukarno imperialis Indonesia tetap saja imperialis yang mengespor, didukung oleh pemaparan data-data ekspor dari tahun 1920-1930 yang dalam kondisi normal mencapai dua kali ekspor dari pada impor. Sementara India memiliki keberimbangan dalam ekspor maupun impor. Berdasarkan penjelasan itulah maka Sukarno menyimpulkan bahwa kemandirian ekonomi Indonesia memiliki

bentuk dan basis filosofinya sendiri yaitu marhenisme.

Prinsip marhenisme ini sekaligus pembeda dari dengan gagasan swadhesi Prinsip marhenisme oleh Sukarno berasaskan prinsip yang lebih universal/egaliter. Marhaenisme bagi Sukarno adalah politik tanpa mengenal kelas yang akan mengantarkan pada kemerdekaan. Marhaen dan marhaenisme menurut Sukarno adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Marhaen ia definisikan sebagai kaum ploletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat yang lain (Sukarno, *Suluh Indonesia Muda*, 1932: 285). Marhaen bukan merupakan kaum tani tetapi juga kaum buruh, pedagang kecil, kaum ngarit, kaum tukang kaleng, kaum grobak, kaum nelayan, dan kaum lain-lain (Sukarno, *Suluh Indonesia Muda*, 1932: 286). Menurut Sukarno, marhaenisme adalah sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Gerakan marhenisme yang mengantarkan pada kemerdekaan ekonomi dan politik bagi Sukarno adalah bersatunya marhaen. Menguatnya gagasan kemandirian ekonomi terjadi seiring dengan menguatnya gagasan kemandirian politik. Pada tahun-tahun 1930an seiring menguatnya gagasan kemandirian politik dan ekonomi adalah situasi pada saat terjadi ketidaksatabilan ekonomi akibat krisis dunia. Hal ini juga berdampak tidak stabilnya harga ekspor, ekspor turun maka impor dikurangi termasuk bahan makanan (M.C. Ricklefs, 2008: 385). Dampak krisis ini cukup serius bahwa pekerja Indonesia cenderung bekerja sebagai petani untuk menyambung hidup dan bahkan ada yang tidak memiliki kesempatan sama sekali (M.C. Ricklefs, 2008: 387). Situasi ekonomi yang tidak stabil sekaligus menjadi penjelasan tentang menguatnya gagasan kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi dalam hal ini ditempatkan sebagai alternatif jalan keluar terjadinya krisis ekonomi dan krisis politik dengan menguatnya nasionalisme.

Gagasan kemandirian ekonomi yang digagas pada masa kolonial secara implementasi negara dapat dilihat pada tahun 1961. Sukarno yang kemudian memberi istilah kemandirian ekonomi ini dengan “berdikari”. Perekonomian berdikari yang lebih menguntungkan Indonesia dengan carapelaksanaan kebijakan ekonomi baru: Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Meskipun demikian Program transformasi ekonomi itu pada akhirnya berbenturan dengan sentimen modal asing. Penyelesaiannya Sukarno adalah berkompromi; modal asing boleh masuk namun dengan batasan yang jelas.

## KESIMPULAN

Kemandirian ekonomi adalah sebuah gagasan yang tidak usang meskipun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai kontekstualnya. Kemandirian ekonomi adalah salah satu wawacana yang hadir di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi kolonial, krisis ekonomi dan menguatnya nasionalisme. Gagasan kemandirian ekonomi yang berkembang di era kolonial memiliki akar-akar gagasan yang tidak tunggal. Sartono salah satu tokoh Partai Nasional Indonesia memiliki gagasan yang tidak dilepaskan dari gagasan swadhesi di India. Sementara Sukarno memilih lebih suka menggali kemandirian ekonomi dari akar-akar bangsanya sendiri berbasis marhaen dan marhenisme. Meskipun demikian kemandirian ekonomi menjadi bagian konsep yang diaplikasikan dalam konsep yang negara baru dilakukan setelah Indonesia merdeka yaitu 1961 dengan berbagai dinamikanya.

Konsep kemandirian ekonomi ini terus berkembang seiring dengan perubahan waktu. Sebagai contoh adalah upaya kebijakan kemandirian ekonomi pada masa orde baru. Meski idenya sama dan memiliki unsur upaya untuk melakukan kemandirian ekonomi

platform Orde Baru “swasembada” tidak berakar dari prinsip kemandirian ekonomi oleh Sukarno. Ini karena Orde Baru memiliki platform developmentalisme dengan sponsorship dan jargon yang berbeda dari lembaga donor di masa perang dingin di era Sukarno,

Kini kemandirian ekonomi menjadi bagian semangat individu dalam upaya proteksi terhadap produk lokal dan menandingi wacana liberalisasi pasar. Dan tidak kalah menariknya kemandirian ekonomi kini menjadi bagian wacana gagasan melindungi lingkungan yang mulai terancam. Perubahan gagasan kemandirian secara kesinambungan ini tentu saja menjadi peluang dalam penelitian keberlanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artaya, “ALC: Gerakan Swadesi Kedaulatan Pangan, 2020, <https://atnews.id/portal/news/6263>.
- Dharam P. Ghai, “Concepts and Strategies of Economic Independence”, *The Journal of Modern African Studies* , Mar., 1973, Vol. 11, No. 1 (Mar., 1973), pp. 21-42.
- Geogrege Otis Smith, “Theory and Practice of National Self-Sufficiency in Raw Materials”, *Proceedings of the Academy of Political Science in the City of New York*, Vol. 12, No. 1, *International Problems and Relations* (Jul., 1926), pp. 116-122.
- Ivan T. Berend , “The Failure of Economic Nationalism: Central and Eastern Europe before World War II”, *Revue économique* , Mar., 2000, Vol. 51, No. 2, *De l'Europe d'avant-guerre à l'Europe d'aujourd'hui: Regards sur l'Europe de 1939* (Mar., 2000), pp. 315-322.
- James A. Caporasa, *Teori-teori Ekonomi Politik*, Yogyakarta: Kompas, 2008.

- John Maynard Keynes, "National-Self Sufficiency", *An Irish Quarterly Review*, Jun., 1933, Vol. 22, No. 86 (Jun., 1933), pp. 177-193.
- Leo Grebler, "Self-Sufficiency and Imperialism", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Jul., 1938, Vol. 198, Present International Tensions (Jul., 1938), pp. 1-8 .
- Marianne Jorgensen and Louise J. Phillips, *Discourse Analysis as Theory and Method*, London: SAGE, 2002.
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Yogyakarta: Serambi, 2008.
- Priyanut Piboolsravut, "Sufficiency Economy", *ASEAN Economic Bulletin*, April 2004, Vol. 21, No. 1, Thailand: Economic Challenges and the Road Ahead (April 2004), pp. 127-134 .
- Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, "Swadeshi and Mass-Action in Indonesia: Swadeshi and Imperialism", *Suluh Indonesia Muda*, 1932).  
*Suara Umum*, 14 Juli 1927.  
*Suara Umum*, 2 Januari 1932.  
*Suara Umum*, 26 Maret 1932.